



## PUBLIC AFFAIRS CORNER

# PR dan Literasi Keuangan

Tanggal 12 September 2021 ada berita kecil di Kumparan tentang Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember, Hardi Rofiq

Nasution, yang penasaran dengan maraknya penawaran pinjaman *online* (pinjol) ilegal. Beliau ingin menyelidiki praktik ini dan melalui kerabatnya seolah-olah akan memanfaatkan salah satu penawaran yang ada. Praktek pinjol liar ini menjerat banyak sekali orang yang memang sudah kesusahan sebagai akibat pandemi COVID-19.

Angka konkrit yang didapatkan dari penelitian lapangan oleh Ketua OJK Jember ini adalah bahwa dari pinjaman nominal sebesar Rp 1 juta, yang ditransfer cuma Rp 700.000 atau 70 persen. Dana yang harus dibayar kembali dua hari kemudian adalah Rp 1.065.000 berarti tingkat bunganya 52 persen atau setara dengan pengenaan bunga pinjaman 26 persen per hari. Memakai metode perhitungan bunga bank tahunan jelas angkanya sangat fantastis, maka tidak mengherankan praktek semacam ini sangat meresahkan. Namun demikian paling tidak masih ada uang yang didapatkan.

OJK sudah beberapa tahun mengumandangkan perlunya literasi keuangan agar masyarakat tidak mudah terjebak atau termakan rayuan dari para pencari keuntungan yang tidak wajar, di masa lalu istilah yang dipakai adalah “lintah darat” yang mencari mangsa justru di kalangan orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Karena para lintah darat berkeliaran di mana-mana, maka para

pelaku industri komunikasi semestinya turut mendukung upaya ini agar tidak semakin banyak anggota masyarakat yang bagaikan sudah jatuh masih ditimpa tangga pula.

Kiranya perlu upaya yang masif dan mungkin juga sudah dimulai di bangku sekolah agar orang menilai semua penawaran secara kritis dan realistis. Ada pemeo dalam Bahasa Inggris yang bunyinya *if something sounds too good to be true, it probably is*. Maknanya, meminta kita waspada kalau ada sesuatu yang nampaknya sangat menggiurkan sehingga sulit dipercaya karena kemungkinan besar kita akan teperdaya atau menjadi mangsa penipu. Jadi, dari sejak kanak-kanak kita sudah harus dibiasakan menilai segala sesuatunya dengan kritis dan tidak menelan begitu saja iming-iming di depan mata.

Jauh sebelum zaman internet, di tahun-tahun 1980-an sangat marak penawaran-penawaran yang menggiurkan seolah-olah datangnya dari ahli waris orang yang sangat kaya di Nigeria yang dananya puluhan atau ratusan juta dollar diblokir oleh penguasa moneter. Untuk mencairkannya kembali, diperlukan dana besar dan pihak yang bersedia menyediakannya dijanjikan bagian dari dana yang akan dicairkan itu. Saya sendiri pernah beberapa kali menerima surat seperti itu yang memakai perangko dan alamat di Nigeria.

## Masalah Sosial

Yang sangat memilukan adalah kisah seorang nenek di Jerman yang termakan oleh bujukan ini. Seluruh simpananannya sebesar beberapa ratus ribu *deutsche mark* lenyap. Waktu itu Jerman dan negara-negara Uni Eropa lain masih memakai mata uang negara masing-masing, belum memakai mata uang bersama Euro yang berlaku di semua negara Uni Eropa secara bertahap mulai tahun 1999 kecuali Inggris dan Denmark. Dengan pendukung Brexit yang menang sangat tipis dalam referendum, Inggris tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah meninggalkan Uni Eropa. Praktik seperti di atas di zaman internet semakin berkembang dan sekarang negara-negara yang diakui sebagai tempat asal para penipu itu semakin

beragam, banyak negara Arab sekarang sudah menjadi “domisili” mereka.

Wilayah operasi para penipu tidak mengenal batas negara. Sekitar sepuluh tahun lalu seorang purnawirawan perwira tinggi kenalan saya datang ke kantor bersama istrinya minta pendapat tentang uang yang dipinjamkannya kepada dua orang asing yang mengaku bekerja di PBB. Uang beberapa ratus juta dipinjamkan dengan jaminan “sertifikat” yang dikeluarkan PBB. Janjinya uang akan dikembalikan dengan imbalan yang besar. Dia juga minta agar dokumen itu tidak saya *copy* mengikuti pesan para “pejabat PBB” itu. Dengan berat hati saya sampaikan kepada kenalan saya itu bahwa sangat tipis peluang uangnya akan kembali. Purnawirawan tersebut tidak bergelombang dalam kelimpahan materi dan saya tidak tega mengatakan bahwa uangnya sudah lenyap.

Dari contoh-contoh di atas jelaslah bahwa para korban penipuan karena kurangnya literasi keuangan pada umumnya bukanlah orang-orang kaya. Banyak di antara mereka kehilangan simpanan untuk hari tua sehingga praktik-praktik penipuan ini menimbulkan masalah sosial yang besar. Hingga kini belum ada data konkritnya, tetapi contoh sudah banyak saya lihat. Tulisan ini baru menyentuh pinjam meminjam uang, masih ada bidang asuransi yang juga masih diliputi banyak ketidaktahuan, terutama tentang klaim kepada perusahaan asuransi karena seringkali ada ekspektasi bahwa semua klaim harus dibayar. Pemahaman dasar tentang asuransi pun merupakan bagian dari literasi keuangan.

Seperti saya katakan di atas, pelaku PR dan industri komunikasi pada umumnya perlu berperan serta menyebarkan literasi keuangan. Supaya tidak merupakan upaya individual, mungkin Perhumas atau PR INDONESIA dapat melakukan koordinasi di antara para praktisi komunikasi dengan lembaga-lembaga keuangan pemerintah, dalam mencari jalan terbaik untuk penyebarluasan literasi keuangan secara efektif. ●



**Noke Kiroyan**  
Chairman & Chief Consultant  
KIROYAN Partners